

Peran Pemerintah Desa dalam Pengendalian Pengambilan Pasir Pantai Secara Ilegal oleh Masyarakat di Desa Air Kumpai, Kecamatan Suak Midai

Maya Gustiana Putri

Universitas Maritim Raja Ali Haji; mayagustianiputri@gmail.com

Abstrak: Pengendalian pasir ilegal perlu dilakukan dengan harapan dapat mengurangi dampak kerusakan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya hayati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pengendalian pengambilan pasir ilegal di Desa Kecamatan Suak Midai. Penelitian ini dilakukan di Desa Air Kumpai, Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan metode kualitatif. Pengambilan data Primer dilakukan wawancara terhadap narasumber dan responden. Data sekunder diperoleh dengan dilakukan studi pustaka dan juga dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya untuk melakukan pengendalian terhadap pengambilan pasir di desa Air Kumpai. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti melakukan sosialisasi, pemasangan papan larangan untuk melakukan pengambilan pasir. Selain itu masi ada masyarakat yang melanggar peraturan dan melakukan pengambilan pasir secara ilegal dan kurang paham terkait dampak rusaknya lingkungan hidup,serta faktor kebutuhan hidup yang mendorong masyarakat berani untuk melakukan pengambilan pasir ilegal. Pemerintah desa dan aparat penegak hukum masi kurang tegas dalam melakukan tin dakan sesuai dengan ketentuan pidana yang di atur dalam peraturan perundang- undangan.

Kata Kunci: Masyarakat, Pengambilan Pasir Ilegal, Peran Pemerintah Desa.

DOI: <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.158>

*Correspondensi: Maya Gustiana Putri
Email: mayagustianiputri@gmail.com

Received: 15-12-2023
Accepted: 20-12-2023
Published: 09-01-2024



Copyright: © 2023 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Controlling illegal sand needs to be carried out in the hope of reducing the impact of damage to the environment and biological resources. This research aims to find out the role of the village. This research was conducted in Air Kumpai Village, Suak Midai District, Natuna Regency. The method used in this research is a qualitative method approach. Primary data collection was carried out by interviews with sources and respondents. Secondary data was obtained through literature study and documentation. The results of the research show that the Village government has attempted to control sand extraction in Air Kumpai Village. Efforts made by the government include conducting outreach and installing boards prohibiting sand extraction. Apart from that, there are still people who violate regulations and steal sand and do not understand the impact of damage to the environment or the necessities of life that encourage people to dare to steal sand. The village government and law enforcement officers are still less firm in taking action by criminal provisions regulated in statutory regulations.

Keywords: Illegal Sand Extraction, Public, The Role Of Village Government.

Pendahuluan

Desa air Kumpai merupakan salah satu desa di kecamatan Suak Midai. Mata pencaharian masyarakat disini yaitu nelayan dan petani selain itu ada beberapa warganya yang

melakukan aktivitas mengambil pasir dari tepi pantai atau juga disebut penambang pasir rakyat walaupun secara ilegal atau tanpa izin, keadaan ini membuat desa ini pernah mengalami kenaikan air laut pada bulan desember atau pada angin Utara sehingga dibangun batu miring, keadaan ini tidak membuat anggota masyarakat berubah profesi dari mengambil pasir di tepi pantai, malah pasir yang diambil semakin banyak sehingga pantai menjadi erosi (Muhammad, 2019; Putra, 2018). Memang tidak dapat di pungkiri bahwa lingkungan hidup adalah suatu obyek penting bagi kehidupan manusia. semua kebutuhan manusia tidak bisa terlepas dari intervensi lingkungan (Sembiring, 2019; Probosiwi, 2018; Palar & Lengkong, 2022). Manusia memerlukan lingkungan hidup yang sehat sepanjang hidupnya agar dapat menjalani kehidupan yang nyaman dan memenuhi keinginannya. Setiap orang dan keluarga tentunya harus melakukan upaya dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia untuk menjaga lingkungan yang sehat dan seimbang. Namun pada kenyataannya, banyak penduduk lokal yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar mereka, terutama jika menyangkut perekonomian lokal (Hulukati & Isa, 2020; Lingganingrum & Akbar, 2023). Lingkungan diubah sesuai dengan kebutuhan manusia. Bahkan saat ini, masyarakat semakin mendapat tekanan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk penggunaan lingkungan secara berlebihan dengan mencuri pasir dari pantai. Kebijakan pemerintah mengatur peraturan yang berkaitan dengan penambangan pasir rakyat. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tepatnya pada pasal 67, hanya penduduk setempat atau koperasi kelompok yang anggotanya setempat yang dapat diberikan izin eksploitasi universal (HAKI). Wilayah pertambangan masyarakat (WPR) diperlukan bagi para penambang untuk melakukan operasi penambangan. Wilayah pertambangan atau WPR menjadi salah satu syarat pembentukannya harus memiliki izin eksploitasi universal (HAKI). Itu sebabnya sebelum mendapatkannya HAKI diperuntukan bagi penyelenggara persorangan atau koperasi kelompok, anak dibawah umur harus mengajukan permohonan untuk proses penetapan wilayah pertambangan masyarakat (WPR). Ketika masyarakat melakukan aktivitas pengambilan pasir secara ilegal maka pihak berwajib akan melakukan tindakan berupa penggrebakan atau peringatan (Pondaag et al., 2021) (Maulidi, 2021)

Metode

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini metode yang dipakai disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai antara lain bagaimana peran pemerintah terhadap pengambilan pasir pantai secara ilegal oleh masyarakat di desa air kumpai, kepulauan riau tersebut. Oleh karena itu metode yang dipakai adalah metode studi dokumentasi, observasi dan wawancara secara mendalam terhadap pemngambil pasir dan warga masyarakat setempat. Yang pertama dilakukan studi dokumen yang berkaitan dengan pertambangan rakyat, setelah itu dilakukan observasi ke lokasi penelitian. Dari hasil studi dokumen dan observasi selanjutnya dilakukan wawancara secara mendalam kepada para pengambil pasir dan pemerintah desa, keseluruhan data yang diperoleh dan terkumpul melalui studi dokumen, ovservasi, dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif yaitu dengan

menghubungkan antara data yang ada yang berkaitan dengan pembahasan dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Peran Pemerintah Desa Dalam pengendalian Pengambilan Pasir Pantai Secara Ilegal

Peran Pemerintah desa terlibat dalam perencanaan penggunaan lahan yang berkaitan dengan sumber daya alam, termasuk pasir pantai. penentuan kawasan khusus untuk kegiatan ekstraksi akan memungkinkan pengambilan pasir dilakukan secara berkelanjutan, serta memantau dan pemeliharaan ekosistem pantai untuk melindungi keanekaragaman hayati dan pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengambilan pasir ilegal, dan melakukan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pengambilan pasir pantai ilegal terhadap lingkungan dan kehidupan mereka sendiri. Pemerintah desa dapat menetapkan peraturan dan kebijakan yang jelas terkait dengan pengambilan pasir pantai untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak dilakukan secara keberlanjutan dan sesuai dengan ketentuan hukum, selain itu pemerintah desa juga memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan yang telah ditetapkan, ini melibatkan upaya aktif untuk menetapkan dan menindak pelaku pengambilan pasir. Pemerintah desa air kumpai harus bekerja sama dengan otoritas pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan dukungan, sumber daya dan bantuan teknis untuk mengatasi pengambilan pasir ilegal. Masyarakat harus memahami peraturan perundang-undangan terkait penambangan pasir pantai untuk mendukung pemerintah daerah dalam upaya penegakan aturan. Selain itu sistem pemantauan harus dikembangkan untuk melacak aktivitas pengambilan pasir dan menilai dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, kebijakan yang ada harus ditinjau ulang agar dapat berjalan secara efektif mengendalikan pengambilan pasir ilegal dan melindungi sumber daya alam. Melalui upaya bersama antara pemerintah desa, masyarakat dan kelompok terkait lainnya, kita dapat mengatasi masalah pengambilan pasir ilegal secara lebih efektif sehingga mendukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, Partispasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam setempat ini dapat mendorong keterlibatan langsung dalam pengawasan, laporan aktivitas ilegal dan pemantauan lingkungan.



Gambar 1. Papan larangan pengambilan pasir pantai

Dengan tindakan aktif dan keterlibatan pemerintah desa bersama dengan dukungan dari berbagai pihak terkait pengambilan pasir pantai secara ilegal dapat dikendalikan sehingga bisa menjaga kelestarian sumber daya dan kehidupan masyarakat, serta pemerintah harus menyeimbangkan upaya-upaya untuk mencapai pengambilan keputusan yang seimbang dan keberlanjutan yang mengabungkan kebutuhan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Untuk mengatasi permasalahan pengambilan pasir pantai secara ilegal, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat lokal, dan penegak hukum. Dari pihak pemerintah desa tidak memiliki upaya untuk mengendalikan atau memberhentikan pengambilan pasir pantai secara ilegal ini, dikarenakan warga yang bekerja mengambil pasir pantai adalah janda dan orang yang kurang mampu. Sehingga dari pihak desa memberikan peraturan boleh mengambil pasir pantai namun tidak boleh menjual pasir tersebut diluar desa air kumpai, jika ada yang menjual di luar desa itu maka dikenakan sanksi, meski sudah disepakati dalam PERDES. Namun masih ada beberapa pekerja yang menjual pasir pantai tersebut di luar Desa Air Kumpai secara ilegal yang melanggar peraturan yang sudah disepakati, sehingga munculnya konflik antar sesama pengambil pasir yang di mana pekerja lain merasa pemerintah desa tidak adil dikarenakan saat pekerja lain melaporkan ke pemerintah desa bahwa ada pekerja lain yang menjual pasir diluar desa. pada saat pekerja melaporkan bahwa ada yang menjual pasir diluar desa, pemerintah desa hanya diam dan tidak memberikan sanksi apapun terlebih itu kerabat dekat atau saudaranya. Pemerintah Desa Juga menyebutkan bahwa pengambilan pasir pantai ini berdampak pada lingkungan yaitu terjadinya abrasi pada pantai di RT 01/RW 02 setelah adanya abrasi ini pemerintah langsung berupaya memasang batu miring untuk mencegah lebih banyak abrasi.



Gambar 2. Batu miring

Masyarakat Desa Air Kumpai pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak desa mengenai larangan dan dampak lingkungan akibat dari pengambilan pasir pantai. setelah mendapatkan sosialisasi masyarakat sudah mengetahui dampak pengambilan pasir pantai tersebut, namun mereka masih tetap melakukan pekerjaan itu dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak memiliki pekerjaan lain. Masyarakat tidak bisa

berhenti mengambil pasir secara ilegal ini dikarenakan pemerintah desa tidak ada memberikan pekerjaan lain jika mereka berhenti.

Simpulan

Peran pemerintah Desa dalam pengendalian pengambilan pasir pantai secara ilegal sangat penting untuk menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat hal ini melibatkan pemerintah desa tidak hanya sebagai pengamat namun sebagai agen perubahan sebagai pencipta pengetahuan masyarakat. Melalui serangkaian tindakan termasuk pemantauan aktif, pendidikan, pengembangan ekonomi alternatif dan kerja sama lintas sektoran pemerintah desa dapat memimpin pemberantasan pengambilan pasir ilegal. Kegiatan pemerintah desa tidak berdampak pada perlindungan lingkungan hidup melainkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan yang cerdas dan kerja sama yang kuat, pemerintah desa berharap masyarakat menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita dan generasi mendatang. Penting bagi pemerintah desa untuk terus berkomunikasi dengan masyarakat, menggalang dukungan dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah desa tidak hanya menangani kasus individual tetapi juga membangun sistem perlindungan yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Pemerintah desa harus menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif dan berkelanjutan dalam mengendalikan pengambilan pasir ilegal.

Tindakan pemerintah desa terhadap pengambilan pasir ilegal di masyarakat Desa Air Kumpai, Kecamatan Suak Midai masih kurang tegas dalam pengendalian pengambilan pasir serta kurang adil dalam memberi sanksi kepada para pekerja yang melanggar aturan yang sudah disepakati dalam Peraturan Desa (PERDES). Kurangnya perhatian dari pemerintah desa dapat menciptakan kesenjangan dalam penegakan hukum, dimana beberapa individu atau kelompok dapat merasa bahwa mereka dapat melanggar peraturan tanpa konsekuensi yang serius. Hal ini dapat melemahkan masyarakat yang berbasis aturan dan menciptakan ketidakadilan. Kurangnya ketahanan dapat menciptakan kesenjangan dalam penegakan hukum, dimana beberapa individu atau kelompok mungkin merasa mereka dapat mengabaikan aturan tanpa konsekuensi yang serius. Hal ini dapat merugikan masyarakat yang taat hukum dan menimbulkan ketidakadilan. Selain dampak lingkungan, kurangnya tindakan tegas juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap sosial-ekonomi masyarakat. Penambangan pasir ilegal dapat menghancurkan kehidupan masyarakat yang menjaga lingkungan.

Daftar Pustaka

Di, R., Pakkasalo, D., Dua, K. E. C., Kab, B., Siyasa, P., & Iyyah, S. (2020). *No Title*.

Fakultas, M., Universitas, H., Mada, G., Fakultas, D., Universitas, H., & Mada, G. (1999).

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2–3.

- Hulukati, M., & Isa, A. H. (2020). Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kelestarian Lingkungan Di Kelurahan Tumbihe. *Jambura Journal of Community ...* <https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/jjce/article/view/464>
- Lingganingrum, L., & Akbar, M. F. (2023). Peran Keterkaitan Masyarakat Dengan Birokrasi Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Tambang Pasir Merapi. ... : *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. <https://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/1155>
- Masalah, L. B. (2021). *Bab I Pendahuluan 1.1. 1(April)*, 1–22.
- Maulana, M., Publik, J. U., Pembangunan, K. A., Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Mataram, U. M. (2019). *Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Pembangunan*.
- Maulidi, H. (2021). *Konsep Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penambangan Pasir Secara Ilegal (Studi Kasus Dusun Mangunan Desa Pademawu Timur, Kecamatan Pademawu ...* etheses.iainmadura.ac.id. <http://etheses.iainmadura.ac.id/2039/>
- Muhammad, M. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat*. repository.ummat.ac.id. [http://repository.ummat.ac.id/26/1/COVER-BAB III.pdf](http://repository.ummat.ac.id/26/1/COVER-BAB%20III.pdf)
- Name, C., Name, T., Revd, R. T., Lungile, L., World Economic Forum, Fitzpatrick, T., Modeling, L. M., Measurement, F., Snowrift, O. N., Environmental, A. R., Regional, S. S., Power, E., Limited, G. C., Influence, T. H. E., Snow, O. F., On, F., Around, S., Embankment, T. H. E., Wind, I. N., ... End, F. Y. (2021). *Paper Knowledge. Toward A Media History Of Documents*, 3(2), 6.
- Palar, Y. N., & Lengkong, J. (2022). Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Liar Di Sungai Ranoyapo Dan Implikasinya Bagi Jemaat Gmim Tesalonika Buyungon. *DA'AT: Jurnal Teologi Kristen*. <https://ejournal-iakn-mandao.ac.id/index.php/daat/article/view/861>
- Pinrang, P. K. (2023). *Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah. Jurnal Ilmiah Aset*, 11(2), 24–33.
- Pondaag, E. V, Pangemanan, F. N., & Kumayas, N. (2021). Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Di Kecamatan Tombatu Utara). *GOVERNANCE*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/36058>
- Probosiwi, R. (2018). Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penciptaan Kesenjangan Sosial. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*.

<http://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jpks/article/view/1620/0>

- Putra, W. G. M. (2018). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Penambangan Pasir Illegal Di Kecamatan Sanden*. etd.repository.ugm.ac.id. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/167234>
- Rahim, A., Usman, J., & Handam, H. (2012). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Desa Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.26618/Ojip.V2i1.30>
- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Prosiding Seminar Nasional Hasil ...* <https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/401>
- Sembiring, T. B. (2019). *Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Desa Pantai Cermin Merupakan Desa Binaan Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi , Pekerjaan Warganya Kebanyakan Mengambil Pasir Dari Dalam Sungai Wampu Secara Illegal Atau Tanpa Izin , Keadaan In*. 1629–1634.
- Siburian, N. Y. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan. *Jom Fakultas Hukum*, 3(2), 1–15.
- Syafruddin, & Ihsan. (2018). Proses Penambangan Pasir Pantai Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. *Jurnal Pendidikan Ips*, 8(1), 70–75. <https://doi.org/10.37630/Jpi.V8i1.119>
- Tambang, S., Besi, P., & Bandungharjo, D. (2016). *Kabupaten Mulai Tergerak Setelah Warga Dasar Penolakan Bahwa Aktivitas Penambangan Pasi Besi Harus*.
- Winarni, F. (2018). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Penambangan Pasir Illegal Di Kecamatan Sanden Wratsongko Gajah Mada Putra, Dr. Rr. Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum., Dr. 87 Fajar Winarni, S.H.,M.H*. 2015–2017.
- Yanti, F. R. (2020). Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Illegal Persefektif Siyasa Dusturiyah. *Repository Iain Bengkulu*, 5(3), 248–253.